

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021



Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyusun Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2021.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusunnya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ini.

Sumber, Januari 2021

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon**

Dr. H. HARRY SAFARI M, Drs., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610815 198603 1 012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.3. TUJUAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA	6
BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	7
2.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJ UTAMA	7
BAB III PENUTUP	9
LAMPIRAN.	
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legilemate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai batasan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan pada Visi dan Misi Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok mengatur sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam peraturan tersebut menyatakan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah lembaga teknis daerah berbentuk dinas, merupakan unsur penunjang



Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi dan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis diseminasi informasi dan statistik;
- b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis telematika dan persandian;
- c. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas urusan komunikasi dan informatika;
- d. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan *e-Government*, informasi dan infrastruktur telematika;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
- g. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokoknya adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

a. Sekretaris, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Kepegawaian

b. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi :

- 1) Seksi Statistik
- 2) Seksi Persandian

c. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :

- 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi

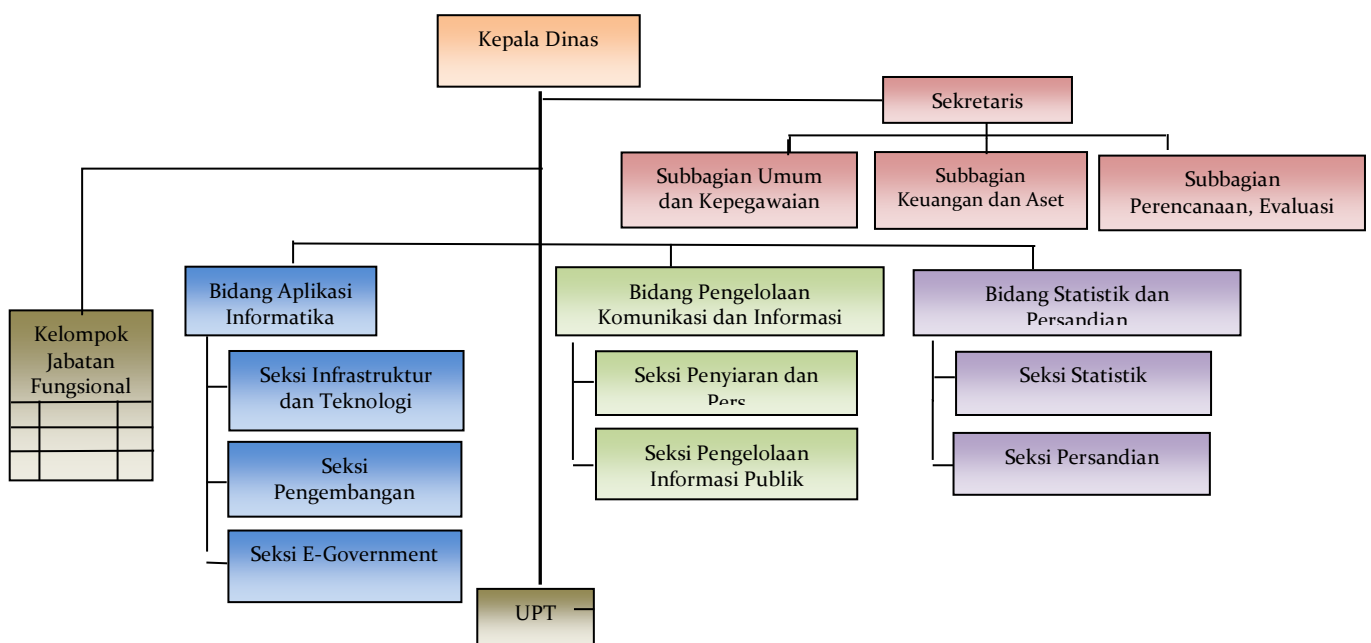


- 2) Pengembangan Aplikasi
- 3) Seksi E-Government

d. Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi:

- 1) Seksi Penyiaran dan Pers
- 2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat disajikan pada gambar berikut :



1.3 TUJUAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan korupsi
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik



- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur pemerintahan
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar pemberian atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan berkelanjutan. Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana aksi atas perjanjian kinerja) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja dalam dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggunakan indikator kinerja tingkat hasil (*outcome*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan secara keseluruhan. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja Tahun 2021



sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021)



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ini merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Dengan demikian rencana aksi atas perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja penilaian terhadap pejabat tersebut. Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja, dengan memacu bawahan untuk lebih meningkatkan kinerjanya kepada atasan dan kepada masyarakat.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2021, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Sumber, Januari 2021

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon**

Dr. H. HARRY SAFARI M, Drs., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610815 198603 1 012

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN STRATEGIS : KESATU

SASARAN STRATEGI														
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi														
INDIKATOR KINERJA		TARGET												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Indeks Domain Tata Kelola SPBE													3,18 poin	
NO	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Peningkatan ketersediaan infrastruktur TIK dan aplikasi yang terintegrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
Jumlah layanan domain utama dan layanan sub domain dan Dilaksanakannya koordinasi dengan perangkat daerah lain lintas sektor dalam rangka pelayanan berbasis elektronik			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.978.400	3.218.400	3.658.400	3.218.400	4.538.400	5.138.400	5.878.400	6.288.400	4.978.400	2.778.400	2.650.000	2.645.000
Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas, Jumlah pemeliharaan Fiber Optik router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo, Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang fiber optik WAN yang dibelaniakan			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	196.540.400	130.540.400	130.790.400	521.819.860	273.340.400	340.153.800	284.540.400	251.540.400	251.540.400	157.860.400	129.770.000	129.750.000
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
Jumlah dokumen perencanaan e-governmen			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.216.200	3.109.200	3.646.200	136.458.800	60.141.000	39.428.600			
Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pemerintah, Jumlah pemeliharaan NOC, Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang NOC yang dibelaniakan			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	17.185.200	16.235.200	16.235.200	26.803.400	16.235.200	28.343.400	30.718.600	83.387.200	164.777.260	23.580.400	24.394.500	15.850.000
Jumlah aplikasi yang mendukung keterbukaan informasi dan Terlaksananya seminar terkait teknologi untuk masyarakat			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			11.471.000	35.050.200	14.188.000	25.659.000	14.188.000	14.188.000	35.050.200			
Jumlah promosi dan sosialisasi Smart City berbasis elektronik			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2.478.400	2.478.400	2.478.400	17.900.400	2.478.400	9.078.400	9.078.400	2.478.400	9.078.400	2.478.400	2.350.000	2.350.000

OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah aplikasi yang mendukung smart city			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				47.959.000	14.188.000	14.188.000						
Jumlah aplikasi yang mendukung pelayanan masyarakat Kab Cirebon dan koordinasi dengan pemerintah daerah lain			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.828.400	14.299.400	17.921.400	41.523.500	40.089.250	24.074.500	20.770.600	22.669.250	50.952.500	4.253.000	8.493.350	5.845.100
Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung Smart City dan Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	3.258.400	3.258.400	3.258.400	30.158.400	3.258.400	3.258.400	11.503.900	20.285.900	11.568.400	3.258.400	3.130.000	3.802.900
Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan/bimtek dan Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.478.400	2.478.400	2.478.400	2.478.400	2.478.400	59.479.300	2.478.400	2.478.400	2.478.400	2.478.400	2.350.000	2.350.000

Sumber, Januari 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

Dr. H. HARRY SAFARI M, Drs., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610815 198603 1 012

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**


PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGI													
Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik													
INDIKATOR KINERJA		TARGET											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Indeks Keterbukaan Informasi Publik												58,05%	
NO	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Temu Bakohumas Tk Nasional			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik									24.999.800				
Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	9.924.700	10.099.700	10.349.700	18.388.500	10.799.500	10.349.700	10.349.700	18.313.500	9.924.700	10.374.500	9.411.100	9.411.100	
Jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan			Pengelolaan Media Komunikasi Publik		39.087.350		38.437.350		38.437.350		38.437.350					
Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Terlaksananya penyebaran informasi melalui pemutaran film dan wawar keliling, Terpublikasikannya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media TV dan media lain			Pelayanan Informasi Publik	10.111.300	45.312.400	45.889.400	21.886.400	46.947.400	77.102.200	56.129.400	61.010.400	66.122.400	61.873.400	55.369.000	56.245.800	
Jumlah diseminasi informasi melalui media radio			Layanan Hubungan Media	71.104.200	71.104.200	71.104.200	145.686.800	145.686.800	73.136.800	71.104.200	211.686.800	71.104.200	73.136.800	4.740.600	6.774.400	
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				52.835.800		3.000.000	35.600.000	29.523.140					
Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	18.228.400	18.228.400	19.676.500	18.723.400	18.853.400	19.045.200	23.568.400	45.216.900	19.544.200	18.348.400	18.725.000	19.535.800	

OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	3.342.400	4.092.400	4.404.400	3.342.400	25.669.800	26.092.400	4.254.400	25.682.800	26.404.400	3.992.400	4.100.000	4.100.000

Sumber, Januari 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon


Dr. H. HARRY SAFARI M., Drs., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610815 198603 1 012

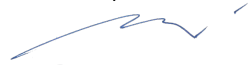
**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGI														
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah														
INDIKATOR KINERJA		TARGET												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral														52,5%
NO	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang tervalidasi dan terverifikasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
Tersedianya buku statistik daerah/profil daerah			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	750.000	4.866.000	4.116.000	5.704.750	3.638.200	50.969.850						
Persentase metadata statistik sektoral yang dibangun			Membangun Metadata Statistik Sektoral		3.661.600	22.894.750	7.471.350	5.031.750	5.000.000	2.500.000	5.000.000	3.750.000	4.500.000		109.500
Jumlah aplikasi satu data yang akan dibangun dan dikembangkan dan Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang dikelola			Pengembangan Infrastruktur	8.935.200	27.461.200	9.685.200	17.563.200	8.935.200	14.875.800	16.352.400	8.185.200	7.435.200	7.435.200	16.728.000	35.185.600
nJumlah dokumen PDRB Kec yang disusun			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		1.250.000	3.753.600	8.408.500	27.434.300	16.718.000	600.000		250.000.000	12.880.000	34.470.000	

Sumber, Januari 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon


Dr. H. HARRY SAFARI M, Drs., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610815 198603 1 012


**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN STRATEGIS : KEEMPAT

SASARAN STRATEGI													
Terwujudnya penyelenggaraan persandian													
INDIKATOR KINERJA		TARGET											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)												II level	
NO	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Meningkatkan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
Jumlah sosialisasi dan monev sertifikasi elektronik dan Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.041.400	11.944.800	4.956.800	7.413.600	5.801.200	51.273.650	49.585.400	5.530.400	7.941.550	17.724.200	5.150.000	4.700.000
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota													
Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring komunikasi sandi dan Jumlah paket pemeliharaan jaringan Santel			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.342.400	3.342.400	3.342.400	8.580.100	7.542.400	4.861.200	5.004.200	7.610.800	7.557.700	3.342.400	3.100.000	3.100.000

Sumber, Januari 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon


Dr. H. HARRY SAFARI M, Drs., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610815 198603 1 012

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN STRATEGIS : KELIMA

SASARAN STRATEGI														
Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon														
INDIKATOR KINERJA		TARGET												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Indeks Kepuasan Masyarakat													3,65 POIN	
NO	AKSI/STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Meningkatkan tata kelola profesional melalui pemenuhan dasar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.096.000	15.996.600	2.416.600	1.761.700	2.757.000	2.468.000	1.246.000	1.426.600	3.160.700	1.280.700	1.246.000	571.000
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.870.900	1.742.300	2.654.200	809.100	3.157.000	11.035.300	9.710.650	1.222.300	1.907.000	3.035.600	1.222.300	5.147.300
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.278.108.900						1.725.915.900				91.970.000	
Jumlah laporan keuangan akhir tahun			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		11.001.900										
Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2.352.000	7.011.600	2.352.000	1.965.000	7.342.800	2.352.000	1.965.000	2.352.000	1.965.000	2.352.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Jumlah lampu yang disediakan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					795.000		795.000				795.000	
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.092.700	48.759.300			17.787.000				
Tersedianya isi ulang tabung gas dan bahan bakar untuk genset			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	130.500	280.500	130.500	280.500	130.500	280.500	130.500	280.500	130.500	280.500	130.500	280.500
Tersedianya jumlah makanan dan minuman rapat pegawai			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000	150.000

NO	AKSI/STRATEGI			JADWAL PELAKSANAAN												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.754.900	657.300	512.900	712.300	544.700	504.300	1.730.900	772.900	564.900	472.500	512.900	472.500	
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.815.000	1.815.000	1.815.000	2.565.000	2.565.000	1.815.000	2.565.000	2.565.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	
Tersedianya Alat Tulis Kantor			Penyediaan Bahan/Material	4.049.100	3.956.800	3.341.400	5.582.200	3.482.900	4.211.600	4.257.300	4.396.200	3.764.700	3.961.300	3.926.800	3.074.200	
Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.899.550	1.050.000		4.536.550	1.050.000	4.686.550	22.081.000	448.550	1.050.000	1.050.000	300.000	
Jumlah mebeleur yang disediakan			Pengadaan Mebel							6.996.000						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik selama 1 tahun			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.050.000	29.050.000	29.050.000	29.050.000	29.050.000	29.050.000	29.050.000	29.050.000	29.050.000	17.767.744	2.050.000	2.050.000	
Tersedianya jumlah jasa keamanan dan ketertiban kantor, jumlah luasan kantor yang dibersihkan dan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.284.800	6.284.800	6.284.800	96.284.800	6.284.800	6.284.800	96.284.800	6.284.800	6.284.800	96.284.800	6.284.800	6.284.800	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Presentase kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	4.200.000	4.200.000	1.000.000
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000	1.448.000	1.000.000	4.130.000	1.496.000	948.000		248.000		744.000	248.000		
Jumlah pemeliharaan AC, komputer, printer			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.330.000	730.000	1.220.000	2.640.000		2.640.000	2.640.000			

Sumber, Januari 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

Dr. H. HARRY SAFARI M, Drs., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610815 198603 1 012